

LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA AMBON
TAHUN 2007



PEMERINTAH KOTA AMBON
TAHUN 2007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada hakekatnya bertujuan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian Pembangunan Ekonomi dan pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan hidup hendaknya dilakukan secara berkesinambungan dan saling memperkuat demi meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai dampak Lingkungan Hidup telah mengisyaratkan bahwa ; Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi ; kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan , pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup perlu diawali dengan proses analisa mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang adalah merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Skenario Pembangunan Kota Ambon Tahun 2007 yang tertuang dalam **misi kedua ; “ Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang demokratis secara berkelanjutan “** yang terfokus pada Pembangunan di bidang Politik dan Pemerintahan, Hukum dan HAM, bidang Sosial Budaya, bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, bidang Ekonomi, bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan tata Ruang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi demi mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang demokratis.

BAB I. PENDAHULUAN

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Ambon untuk memberikan informasi actual tentang status dan kondisi lingkungan hidup Kota Ambon yang meliputi :

- Masalah lingkungan hidup yang dihadapi secara kompleks disebabkan semakin berkembangnya laju pertumbuhan penduduk Kota Ambon.
- Menggambarkan tingkat permintaan akan ruang dan sumber daya alam di lingkungan darat maupun pesisir Kota Ambon.
- Menggambarkan status pengendalian, pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup Kota Ambon.
- Memggambarkan tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan Hidup Kota Ambon dari sisi sosial budaya, ekonomi dan politik.
- Menggambarkan implementasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup.

2. Visi dan Misi Kota Ambon

Visi dan Misi Kota Ambon adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Kota Ambon adalah Terbinanya Persatuan Manusia Ambon Yang “Manis” sebagai prasyarat Membangun Kota Ambon dan meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Bermartabat Secara Berkelanjutan.

2. Misi

Mewujudkan Pembinaan Persatuan Manusia Ambon Yang Manis Secara Berkelanjutan.

- Mewujudkan Pembangunan Kota Ambon Secara Berkelanjutan.
- Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Ambon Yang Bermartabat Secara Berkelanjutan.

Kota Ambon yang dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku berada pada sebuah pulau kecil yang memiliki kondisi fisik wilayah yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan hidup. Dari luas wilayah 377 Km² yang didalamnya terdapat daratan seluas 359,45 km² , hanya 17 % atau kurang lebih 55 km² merupakan daerah dataran. Dengan kondisi fisik wilayah yang sebagian besar ± 83 % merupakan daerah dengan topografi yang berlereng terjal. Problematika yang demikian buat Pemerintah Kota dengan sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan masalah pengendalian dampak lingkungan. Dalam kedudukan yang sangat strategis karena memiliki fungsi ibu kota Provinsi, serta keunggulan ketersediaan infrastruktur sosial dan ekonomi, menjadi daya tarik yang sangat besar

terhadap migrasi penduduk ke kota Ambon. Perpindahan penduduk yang tidak terkendali membawa dampak yang positif maupun negatif terhadap kebijakan Pemerintah Kota Ambon di bidang pemerintahan maupun pembangunan. Problematika Pemerintah Kota Ambon yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya migran penduduk ke Kota Ambon dibarengi dengan semakin bertambah dan meningkatnya produksi sampah di masyarakat. Dampak lain yang mempengaruhi proses penanganan sampah belum tertangani secara optimal yakni adanya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan warga kota selama konflik sosial tahun 1999. Padahal sebelum tahun 1999, kota Ambon selalu dikategorikan sebagai salah satu standart Kota Sedang di Indonesia yang mempunyai pola penanganan sampah terbaik dan atas prestasi tersebut oleh Pemerintah Pusat di anugrahi " Tropi Adipura " di Bidang kebersihan.

3. GAMBARAN UMUM

a. Kondisi Kota Ambon

1. Geografis

Luas wilayah Kota Ambon berdsarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 adalah 377 km² dengan luas daratan 359,45 km dan terbagi dalam 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu :

- Kecamatan Nusaniwe membawahi 5 Desa dan 8 Kelurahan.
- Kecamatan Sirimau membawahi 3 Desa dan 9 Kelurahan.
- Kecamatan Leitimur Selatan membawahi 8 Desa.
- Kecamatan Baguala membawahi 5 Desa dan 2 Kelurahan
- Kecamatan Teluk Dalam membawahi 8 Desa dan 1 Kelurahan.

Secara Astronomi berada pada posisi 3° - 4° lintang selatan dan 128° - 129° bujur timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Selatan : dengan laut Banda.
- Sebelah Timur : dengan petuanan Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Barat : dengan petuanan Desa Hatu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah

2. Demografi

Jumlah penduduk kota Ambon sampai dengan Thun 2006 sebanyak 288,251 jiwa yang teridi dari 150,527 jiwa (52,20 %) dan perempuan 137,251 jiwa (47,80 %) dengan laju pertumbuhan penduduk 5,85 % serta katego ro penduduk miskin pada periode tahun 2006 berjumlah 51,033 jiwa (18%). Jumlah penduduk yang memasuki lansia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 170,507 jiwa yang terdiri dari penduduk angkatan kerja 58,12 % dan bukan angkatan kerja 41,88 % jumlah penduduk yang berkarya sampai dengan Tahun 2005 sebanyak 75,898 jiwa (76,59) tercatat sebesar 52,34 % berdasarkan lapangan

usaha, jumlah penduduk terbesar bekerja di sektor jasa yaitu 36,12 % sedangkan terkecil bekerja di sektor listrik, gas dan air yaitu 1,33 % .

3. Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan di Kota Ambon sampai dengan Tahun 2006 terdiri dari ;

- Rumah sakit milik pemerintah : 2 buah
- Rumah sakit milik TNI : 3 buah
- Rumah sakit milik POLRI : 1 buah
- Rumah sakit milik swasta : 5 buah

Yang dilengkapi dengan sarana incinerator untuk pengolahan limbah padat berkapasitas 100 m / hari dan IPAL untuk pengolahan limbah cair berkapasitas 275 liter / Batch dengan jumlah tempat tidur 732 buah.

- Puskesmas 17 buah, Puskesmas pembantu 29 buah, Apotik 26 buah dan klinik 7 buah dengan ketersediaan sumber daya manusia terdiri dari 17 orang Dokter Ahli, 38 orang Dokter Umum, 10 orang Dokter Gigi, 10 orang Apoteker, 607 para medis serta 200 orang non paramedis.

4. Pendidikan

Sarana pendidikan sampai dengan Tahun 2006 di Kota Ambon terdiri dari :

- Taman Kanak-Kanan (TK), 54 buah jumlah murid 2798 orang 224 orang guru.
- Sekolah Dasar (SD), 187 buah jumlah murid 33,921 orang 2322 orang guru.
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 41 buah, jumlah murid 14,424 orang 1481 orang guru.
- SMU / SMK, 34 buah, jumlah murid 12,587 orang, 1014 orang guru.
- Disamping itu terdapat 4 buah Akademi dan 5 buah Perguruan Tinggi Negeri / swasta.

5. Kependudukan

Penduduk merupakan factor dominant dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan angka Registrasi Penduduk Jumlah penduduk Kota Ambon pada Tahun 2006 berjumlah 263.146 jiwa, meningkat sebesar 0,07 % dari tahun sebelumnya. Relatif kecil karena jumlah migrasi masuk diimbangi dengan jumlah migrasi keluar yang hampir sama banyaknya.

Pola penyebaran penduduk di Kota Ambon masih terkonsentrasi di Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Sirimau yang merupakan daerah pusat kota, dengan masing-masing sebesar 934 jiwa / km² dan 932 jiwa /km². Wilayah terluas dimiliki kecamatan Teluk Ambon Baguala, namun jumlah penduduknya paling rendah, sehingga kepadatannya hanya 478 jiwa untuk setiap km² wilayahnya. Sementara secara keseluruhannya tercatat kepadatan penduduk di Kota Ambon masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar 732 jiwa / km².

b. Kebijakan Pendanaan Lingkungan

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup maka kebijakan pendanaan dari Pemerintah Kota Ambon di tempuh dari berbagai sumber dana baik dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus, Dana APBN maupun yang didanai dari Pemerintah Daerah sendiri.

4. VISI, MISI DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Visi :

Penataan ruang Kota terpadu, mewujudkan citra Kota Ambon yang nyaman, aman, manis dan elok, serta pengendalian dampak lingkungan melalui peningkatan profesionalisme aparatur dalam penerapan manajemen pelayanan public yang cepat dan tepat.

Misi :

Melaksanakan penataan kota secara terpadu, terencana, bersih dan indah serta pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan tata ruang dan bangunan dalam menerapkan manajemen pelayanan publik.

Tujuan, Sasaran, Program dan Dasar Hukum

Mengacu pada Visi dan Misi Dinas Tata kota, Kebersihan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon maka Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Terlaksananya sosialisasi Perda tentang IMB dan penataan / pemanfaatan ruang melalui papan informasi media.
- b. Terlaksananya pendataan, penerbitan serta penataan bangunan pada kawasan kumuh.
- c. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan di bidang pembangunan dan pemanfaatan.
- d. Meningkatnya pelayanan kebersihan dan keindahan kota.
- e. Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
- f. fMeningkatnya partisipasi bagi masyarakat dan usaha dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan.

2. Sasaran

- a. Terciptanya kesadaran hukum didalam masyarakat tentang hak dan kewajibannya disetiap kegiatan pembangunan sesuai dengan penatan / pemanfaatan ruang dan Perda tentang IMB.
- b. Tersedianya data yang akurat tentang bangunan-bangunan oleh masyarakat, Pemerintah / Badan Usaha yang belum memiliki IMB, untuk memproses IMB sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Terlaksananya pelayanan Publik sebagai upaya peningkatan kebersihan dan keindahan.
- d. Terciptanya tata administrasi dan meningkatnya produktivitas kerja serta meningkatkan tugas operasionan di lapangan dalam bidang Tata Kota, Kebersihan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.

3. Program

- a. Penataan ruang dan lingkungan hidup.
- b. Penataan Lingkungan Perkotaan.
- c. Pengdaan sarana dan prasarana.

4. Dasar Hukum

- a. UU Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Perda Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum dalam daerah Kota Madya Ambon Dati Tk II Ambon.
- d. Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon.

BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Pada dasarnya pembangunan adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat agar mereka mempunyai kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan berkelanjutan. Dalam pembangunan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu semua kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan memperhatikan aspek pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikianlah amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Falsafah dan makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut sungguh amat dalam, yaitu adanya suatu filosofi “ Transgenerasi “. Bumi, air dan kekayaan alam yang menjadi modal dasar Pembangunan Bangsa Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat hanya akan tercapai apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, aturan-aturan dasar dan konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jaminan kekayaan akan dapat bermanfaat bagi generasi masa kini dan dapat dinikmati oleh generasi akan datang apabila kekayaan alam tidak mengalami kerusakan dan pencemaran yang diakibatkan oleh eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan dan tidak terencana serta melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam, berbagai sektor telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sektor seperti misalnya Bidang Perindustrian, Kehutanan, Pertambangan, Pertanian, Pengairan, Perhubungan dan Kepariwisata yang di dalamnya mengatur prinsip-prinsip yang mencerminkan kehati-hatian. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih menimbulkan persoalan kerusakan dan pencemaran. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan bagi sumber daya alam agar tidak terus-menerus mengalami degradasi akibat pelaksanaan kegiatan dan atau usaha oleh sektor tersebut.

Tekanan kerusakan dan pencemaran terhadap sumber daya alam tidak hanya berasal dari kegiatan dan atau usaha, tetapi juga berasal dari kegiatan sehari-hari, orang – perorangan, rumah tangga dan kegiatan masyarakat lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya mengatur dan melaksanakan proteksi atau perlindungan terhadap sumber daya alam, yaitu udara, air, tanah, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, pedesaan, perkotaan, lingkungan sosial agar tidak mengalami kerusakan dan atau pencemaran dari pelaksanaan kegiatan dan atau usaha baik yang dilaksanakan oleh orang-perorangan, masyarakat dan badan usaha. Jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap orang dan berkelanjutan penggunaan sumber daya alam yang kita miliki bagi generasi yang akan datang, itulah makna yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan peran dari masyarakat dan dunia usaha menjadi sangat diperlukan, oleh karena itu tidak berlebihan apabila tanggung jawab

pengelolaan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah baik Sektor maupun Daerah, Badan Usaha dan masyarakat dalam arti luas.

Seiring dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yunto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan pelaksanaannya, tanggung jawab pengelolaan lingkungan juga mengalami pergeseran prinsip sentralistik menjadi prinsip yang bersifat desentralisasi (otonom) yang ditik beratkan kepada Kabupaten / Kota. Daerah Propinsi menangani masalah lintas Kabupaten / Kota dan Pemerintah Pusat menangani masalah yang bersifat lintas batas provinsi dan lintas batas Negara lain, limbah B3, teknologi tinggi dan hal lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000. Filosofi yang hendak dibangun dalam konteks pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada prinsip otonomi daerah, yaitu bahwa masyarakat di daerah harus mendapatkan hasil dan manfaat yang nyata dari keberadaan sumber daya alam di daerahnya. Hal ini hanya dapat terwujud apabila tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip otonomi daerah dapat dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah daerah , masyarakat dan dunia usaha. Walaupun saat sekarang masih banyak kendala yang dihadapi oleh daerah untuk mewujudkan hal tersebut seperti :

- a. Peruntukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, akibatnya sumber daya alam di eksploitasi secara besar-besaran tanpa mengindahkan prinsip transgenerasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup memerlukan biaya mahal, akibatnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Lemahnya kemampuan dan kemauan para birokrat untuk melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peran masyarakat sebagai penghasil limbah cair, padat, gas dan sampah rumah tangga yang masih kurang (budaya dan kesadaran hidup bersih dan sehat).
- e. Kurang kemampuan dan kemauan penegak hukum di pusat dan daerah dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan.

Pada era kemajuan teknologi ini, kita mudah lupa bahwa kehidupan ini sangat tergantung pada ketersediaan dan kondisi sumber daya alam. Kita juga lupa bahwa hukum alam sangat penting, bahwa satu sama lain di bumi ini saling berkaitan. Satu ekosistem yang runtuh maka akan berakibat runtuhnya ekosistem yang lain dan akhirnya berimbas kepada manusia dan seluruh kehidupan di bumi ini.

Dampak kegiatan manusia selama abad terakhir ini telah menyebabkan perubahan besar terhadap ekosistem di bumi. Manusia telah mengubah kondisi biologi, fisik dan kimiawi bumi dengan laju yang belum pernah terjadi secepat ini. Sesungguhnya bagaimana kondisi bumi terkini secara global dalam kaitannya sebagai tempat yang layak huni bagi manusia dan mampu menyediakan segala keperluan untuk hidup umat manusia ? dapatkah di peroleh masyarakat yang sejahtera, sekaligus ekosistem yang baik ?

Untuk melihat kondisi berbagai ekosistem sekaligus mengamati kecenderungannya dan memprediksi masa depan berdasarkan beberapa skenario selama beberapa tahun belakangan ini maka lebih dari 600 ilmuwan dari berbagai tempat di dunia terlibat sebagai tenaga ahli yang tergabung

dalam empat kelompok kerja sebagai tenaga ahli, pakar MEA (Millennium Ecosystem Assessment) atau Kajian Ekosistem Milenium yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, informasi dan perangkat yang akan dipergunakan sebagai panduan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh ekosistem bumi. Kelompok kerja ini bekerja untuk menjawab tiga isu penting yaitu :

1. Kondisi terkini dan sejarah kecenderungan pada ekosistem yang penting bagi manusia dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Pilihan-pilihan (options) untuk melestarikan ekosistem dan meningkatkan kontribusi ekosistem untuk kesejahteraan manusia.
3. Skenario masa depan mengenai perubahan pada ekosistem dan kesejahteraan manusia.

MEA akan memformulasikan pilihan (option) bagi para pengambil keputusan / kebijakan dalam mengantisipasi perubahan tersebut, dilengkapi dengan analisa yang jelas mengenai peluang dan konsekuensi, sehingga pilihan-pilihan tersebut dapat dipilih oleh para pengambil kebijakan. Selain menyediakan informasi terkini MEA juga membuat suatu kerangka pikir untuk membandingkan status ekosistem pada berbagai skala waktu dan tipe ekosistem mulai dari hutan hingga kawasan pertanian. Pada skala lokal hingga ke regional dan akhirnya tergabung menjadi analisa global.

Perubahan iklim dan pemanasan global telah menjadi isu hangat dan perhatian dunia. Indonesia mempunyai peran penting dalam isu perubahan iklim global itu dengan menyediakan jasa lingkungan berupa penyerapan emisi karbon dari hutan yang ada. Pasalnya hutan Indonesia seluas 120,3 juta Ha akan mampu menyerap emisi secara signifikan. Namun terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia juga dianggap sebagai sumber emisi karbon karena melepas CO₂ ke atmosfer. Itu sebabnya, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Negara berkembang (Reducing Emission /REDD) merupakan isu terkini dan menjadi agenda utama pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemanasan global merupakan dampak dari aktivitas manusia terutama dalam penggunaan Bahan Bakar Fosil (BBF) yang tidak terkendali serta perubahan penggunaan lahan, sambil menambahkan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup. Indonesia yang memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia yang dianggap sebagai paru-paru dunia namun memiliki persoalan besar yaitu laju deforestasi yang diperkirakan seluas 1,08 juta/tahun hingga Indonesia dinilai sebagai salah satu Negara yang turut andil dalam terjadinya peningkatan gas rumah kaca secara global.

Upaya pemulihan dan pengurangan laju deforestasi telah dilakukan sejak Tahun 2004 lalu melalui kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN), Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, Kampanye Indonesia Menanam dan Swadaya masyarakat, pembangunan hutan tanaman dan pemberantasan illegal logging.

1. Kondisi Lingkungan Hidup Daerah

Melihat dari kenyataan yang ada bahwa lingkungan hidup pada dasarnya meliputi lingkungan darat, laut dan udara. Pada era belakangan ini kondisi lingkungan daerah Maluku mengalami kecenderungan perubahan ekosistem yang berdampak pada makhluk hidup. Kecenderungan perubahan ekosistem ini pada hakekatnya berawal dan bermuara pada tindakan sewenang-wenang dari makhluk hidup (manusia) yang tidak melindungi lingkungan hidup.

Maluku yang memiliki kawasan hutan seluas 4.663.346 Ha dimana dari luas hutan tersebut indikasi kawasan hutan yang perlu dilakukan rehabilitasi seluas 2.762.754 Ha (59 %). Sejak dilaksanakan Gerhan tahun 2001 telah direhabilitasi lahan seluas 28.126, 12 Ha sementara kerusakan hutan antara lain perladangan berpindah, illegal logging, penjarahan hutan, factor agroklimat dan kebakaran hutan. Dalam mengantisipasi pemanasan global di Maluku juga akan melaksanakan kegiatan menanam dan memelihara pohon juga penanaman serentak dan pecan pemeliharaan pohon untuk meningkatkan kepedulian berbagai pihak akan pentingnya penanaman dan budaya pemeliharaan pohon yang berkelanjutan dalam rangka mengurangi pemanasan global, meningkatkan absorpsi gas CO₂, SO₂, mencegah banjir, kekeringan dan tanah longsor serta meningkatkan upaya konservasi sumber daya genetik tanaman hutan untuk mencapai pembangunan Indonesia yang bersih.

a. Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang dasar 1945 Pasal 33.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Sesuai dengan Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah maka di butuhkan tindakan-tindakan nyata antara lain :

- Perlu diwujudkan Pemerintahan Daerah yang bercirikan Good Enviromental Governance.
- Kriteria yang perlu dikembangkan adalah pemberdayaan masyarakat, transparansi, desentralisasi dan demokratis, pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutannya.
- Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal dengan berbagai kearifannya.
- Kejelasan aturan serta penegakan Hukum.

c. Kebijakan Dasar Pemerintah Daerah

- Melaksanakan perlindungan terhadap sumber daya alam sebagai sistim penyangga hidup
- Melakukan pelestarian keanekaragaman jenis sumber daya alam dan ekosistem.
- Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

d. Permasalahan Lingkungan Hidup di Maluku

- Illegal Fishing
- Illegal Logging

- Kelembagaan
- SDM Pengelola Lingkungan Hidup
- Kebijakan tumpang tindih
- Penataan hukum lemah
- Egoisme sektoral
- Konflik kepentingan
- Kerusakan ekosistem pesisir
- Meluas lahan kritis
- Sampah domestik
- Air bersih
- Perubahan iklim

e. Hambatan-hambatan yang dihadapi

- Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum maksimal
- Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup masih lemah
- Ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan hidup belum memadai
- Sistem informasi lingkungan hidup belum terakses secara menyeluruh
- Partisipasi masyarakat rendah

2. Kondisi Lingkungan Hidup Kota Ambon

Kota Ambon atau pulau Ambon yang merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari susunan batuan atol yang didalamnya terbagi menjadi dua daerah administrasi pemerintahan yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon. Dalam kedudukan yang sangat strategis, karena memiliki fungsi sebagai ibu kota Provinsi Maluku serta keunggulan ketersediaan infrastruktur sosial dan ekonomi menjadi daya tarik yang sangat besar terhadap migrasi penduduk ke Kota Ambon. Perpindahan penduduk yang tidak terkendali membawa dampak baik positif maupun negatif terhadap kebijakan Pemerintah Kota Ambon di bidang pemerintahan maupun pembangunan.



Gambar 1. Mangrove di Kelurahan Lateri Kota Ambon

Kota Ambon yang kurang memiliki potensi Sumber daya Alam (SDA) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan daerah, namun dengan kedudukannya sebagai ibukota Provinsi Maluku memiliki keunggulan komparatif yang menonjol dan tidak dimiliki oleh daerah/kabupaten lain di Maluku.

Keunggulan potensi lokal yang membedakan antara Kota Ambon dengan daerah/kabupaten lain yaitu fungsi kota sebagai pusat Pemerintahan Provinsi, pusat pendidikan, pusat aktivitas perdagangan dan jasa, disamping itu ketersediaan berbagai jasa pelayanan perbankan, lembaga asuransi, perhotelan, komunikasi dan sarana perhubungan sebagai jembatan penghubung ke daerah/kabupaten lain di Provinsi Maluku.

Pelaksanaan pembangunan di Kota Ambon pasca konflik tujuh tahun yang lalu yang memberikan perubahan fisik bagi kota maupun psikis bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di Kota Ambon. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan semakin meningkatnya lahan kritis, tidak terkendalinya penggunaan lahan yang akan berdampak pada peningkatan sedimentasi / endapan terutama dari lahan untuk usaha pertanian dan kehutanan menjadi lahan pemukiman. Peningkatan sedimentasi / endapan pada sungai dan perairan, abrasi pantai, serta tumbuhnya pemukiman penduduk yang tidak teratur, di sebabkan kurang perhatian terhadap pembangunan berwawasan lingkungan yang lebih mengutamakan kesinambungan dan keserasian yang dinamis sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu skenario pengembangan Kota Ambon merupakan kolaborasi / perpaduan dari Rencana Tata Ruang serta Kebijakan pengembangan lainnya baik yang bersifat makro maupun mikro.

Sesuai dengan arah strategi pengembangan Provinsi Maluku , maka Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi berfungsi sebagai pusat aktivitas pemerintahan maupun pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan tinggi dan pusat pelayanan sosial. Fungsi Kota Ambon berskala lokal ditetapkan untuk melayani kebutuhan penduduk, lapangan kerja dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya.

Pertimbangan fungsi tersebut didasarkan pada kecenderungan kebijaksanaan pemerintah dalam mengembangkan kota, sedangkan kebijaksanaan yang berskala regional kota ambon berfungsi untuk melayani dalam dan luar provinsi khususnya provinsi terdekat. Cakupan fungsi tersebut meliputi perhubungan laut dan udara, pusat pendidikan tinggi dan pusat pelayanan regional.

Dalam konstelasi regional, pengembangan Kota Ambon tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pelabuhan laut dan Bandar udara (Bandara). Dalam intensitas kegiatan yang cukup tinggi, maka pelabuhan laut kota ambon cukup berperan dalam menunjang peningkatan perekonomian di Provinsi Maluku. Demikian pula dengan Bandar Udara yang kini telah dikembangkan menjadi bandara internasional, memiliki akseptabilitas yang tinggi sebagai jembatan penghubung bagi provinsi Maluku dan Provinsi lain di Indonesia.

Posisi strategis yang dimiliki Kota Ambon merupakan dasar pertimbangan Rencana Tata Ruang Nasional. Untuk itu dalam rangka mengembangkan Kota Ambon ke depan dalam kurun waktu 5 tahun , Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan kebijaksanaan Penataan Ruang Daerah Kota Ambon yang dibagi dalam 7 Sub Wilayah Pengembangan Pusat – Pusat Pelayanan yang diharapkan dapat ditingkatkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi .

7 Sub Wilayah Pengembangan itu antara lain :

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ambon telah mengarahkan bahwa implementasi pembangunan di laksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

1. Sub wilayah Pusat Kota dan sekitarnya (sebagian Amahusu – Latta) akan terus dikembangkan sebagai pusat penyelenggaraan Pemerintahan, Perdagangan, Industri Perikanan Aneka Industri Kerajinan Rakyat, Jasa dan Perhubungan Laut.
2. Sub Wilayah Rumah Tiga dan sekitarnya akan dikembangkan sebagai pusat Pendidikan Tinggi, Pemukiman dan Usaha Pertanian khususnya Tanaman Hortikultura dan Pangan.
3. Sub wilayah Passo dan sekitarnya akan dikembangkan sebagai kawasan Pemerintahan, Perdagangan, Aneka industri, Pemukiman, Pendidikan kejuruan / ketrampilan.
4. Sub Wilayah Laha – Tawiri dan sekitarnya akan dikembangkan sebagai kawasan pelayanan Jasa Perhubungan Udara, Usaha Perikanan, Industri Jasa Maritim, Pertanian Rakyat dan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
5. Sub Wilayah Hutumuri dan sekitarnya akan dikembangkan sebagai kawasan Perkebunan, Hortikultura dan Pariwisata.
6. Sub Wilayah Kilang – Naku dan sekitarnya akan dikembangkan sebagai kawasan Tanaman Hortikultura dan Pariwisata.
7. Sub wilayah Latuhalat dan sekitarnya akan dikembangkan sebagai kawasan Pariwisata, Industri Perikanan, Industri Rumah Tangga, Perkebunan dan Peternakan.

Bertolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ambon yang membagi Kota Ambon menjadi 7 Sub Wilayah Pengembangan Ekonomi, maka dapat dikemukakan kondisi actual Kota Ambon sebagai berikut :

A. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Penduduk Kota Ambon Tahun 2005, tercatat berjumlah 262.967 jiwa. Dalam kurun waktu tahun 2001 – 2005, jumlah penduduk Kota Ambon rata-rata bertumbuh 10.000 pertahun (BPS,2005) atau rata-rata 4,68% pertahun jika tidak ada faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kecenderungan tersebut, maka memasuki tahun 2008 jumlah penduduk Kota Ambon akan berkisar sekitar 280.000 jiwa. Kecenderungan pertumbuhan penduduk tersebut berimplikasi pada :

- a. Penataan administrasi/data base kependudukan
Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi berdampak pada membesarnya beban penataan administrasi/data base kependudukan. Sementara itu belum meratanya kesadaran warga kota untuk melengkapi diri dengan dokumen-dokumen kependudukan – baik penduduk tetap maupun penduduk musiman – mengakibatkan data kependudukan yang ditata dalam sistem informasi kependudukan tidak selalu bias tersedia secara *Up to date*. Hal ini antara lain

mempersulit perolehan input data kependudukan untuk mendukung proses penataan kependudukan dan perumusan kebijakan publik.

b. Daya dukung lingkungan pemukiman.

Sesuai wilayah pemukiman pusat kota (SWPP 1) dan sebagian wilayah sekitar pusat kota (SWPP 3) merupakan wilayah pemukiman lama yang padat penduduk. Kebiasaan masyarakat Maluku menumpang pada keluarga atau kerabat yang umumnya bermukim dalam wilayah pemukiman lama semakin meningkatkan jumlah penduduk pada wilayah pemukiman lama yang meningkatkan tekanan pada daya dukung lingkungan pemukiman. Sementara itu pergerakan penduduk pada masa konflik ke wilayah yang dirasakan aman, mengakibatkan perumahan liar (tanpa IMB) menempati wilayah yang tidak diperuntukan bagi pemukiman, seperti di bantaran sungai, di kawasan resapan air atau kawasan sekitar mata air.

c. Kesehatan lingkungan pemukiman

Kepadatan penduduk pada wilayah pemukiman tertentu menimbulkan masalah kesehatan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan mental.

- Lokasi domisili masyarakat masih tersegregasi menurut latar belakang agama. Belum nampak adanya inisiatif bebas yang meluas dikalangan masyarakat untuk menentukan lokasi domisilinya di sembarang tempat. Hal ini nampaknya berkaitan dengan rasa aman yang bersumber dari kesamaan latar agama. Jika benar, maka masalahnya terletak pada belum pulihnya masyarakat dari trauma konflik berkekerasan dimasa lampau. Tidak ada gejala yang mengakibatkan terjadinya konflik berkekerasan antara kelompok masyarakat yang berdampak langsung terhadap kondisi stabilitas sosial dan keamanan, sesungguhnya masih dipengaruhi oleh kesediaan/kemauan masyarakat untuk memelihara stabilitas sosial dan keamanan berdasarkan pengalaman bersama yang traumatis dimasa konflik yang lalu.
- Interaksi masyarakat (berbeda latar agama) yang didorong oleh kesamaan kepentingan individu maupun kelompok telah berlangsung dengan baik. Namun intensitasnya masih terasa rendah, karena belum didukung pemahaman agama masing-masing yang berorientasi pada peningkatan sikap toleran dan solidaritas sosial.
- Peredaran dan penggunaan narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara illegal cukup meluas dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keuntungan besar yang diperoleh para bandar dan pengedar dari penjualan NAPZA, sempitnya lapangan kerja serta penegakan hukum yang lemah, disamping itu pengetahuan masyarakat mengenai NAPZA masih terbatas.
- Peredaran miras dan kecenderungan meluasnya pornografi saat ini dan dimasa akan datang cukup meluas, terutama di kalangan masyarakat lapisan bawah dan generasi muda. Hal ini berkaitan dengan lemahnya kontrol dan penegakan hukum, kemudahan memperolehnya disamping penjualan miras/sopi masih merupakan mata pencaharian masyarakat lapisan bawah. Sebagian besar tindak pidana penganiayaan, penghilangan jiwa dan perkosaan disebabkan oleh pengaruh miras dan pornografi.

- Tersedianya sarana pendidikan dasar dan menengah yang relatif cukup serta pembiayaan pendidikan dasar dan menengah oleh negara yang terus meningkat sampai saat ini, belum mampu memecahkan masalah penyebaran peserta didik yang merata. Selain itu, masih ada masalah relevansi kelulusan, khususnya kelulusan lembaga-lembaga pendidikan kejuruan, dihubungkan dengan ketersediaan lapangan kerja.
- Kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat, terutama peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas, informasi dan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan lingkungan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kondisi pemukiman yang padat.
- Meluasnya informasi tentang jumlah ODHA (orang dewasa HIV/AIDS), serta keterlambatan Pemerintah dalam aksi dan informasi tentang pengendalian penyebaran HIV/AIDS telah menimbulkan kepanikan dikalangan masyarakat serta meluasnya isu-isu yang berdampak pada meningkatnya tekanan sosial dan psikologis pada ODHA maupun OHIDHA (orang yang hidup dengan ODHA khususnya keluarga dan pendamping). Hal terakhir ini tidak sedikitpun membantu penanggulangan HIV/AIDS di tengah masyarakat.
- Peranan media dalam rangka pendidikan publik untuk memperkuat integrasi sosial masih dirasakan rendah.
- Peran perempuan dan generasi muda dalam proses pembangunan di berbagai lini, dirasakan masih perlu ditingkatkan.

B. BIDANG EKONOMI

Seiring kondisi Kota Ambon yang semakin kondusif telah memungkinkan dilakukannya aktivitas pembangunan pada semua bidang. Khususnya dalam Bidang Ekonomi, diperlukan sinergitas para pelaku ekonomi dengan maksud untuk mengakselerasi proses pembangunan pada umumnya dan dinamika ekonomi pada khususnya. Namun saat ini sumber daya ekonomi kota Ambon belum dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga belum mampu mendorong naiknya PAD, bahkan pertumbuhan ekonomi Kota Ambon secara signifikan. Hal ini tentunya disebabkan masih terbatasnya infrastruktur ekonomi, UMKM dan Koperasi sebagai landasan dalam membangun ekonomi masyarakat belum mampu melepaskan diri dari permasalahan-permasalahan klasik seperti kelembagaan yang lemah, SDM rendah dan tidak profesional, akses permodalan dan pasar yang terbatas, belum optimalnya pemanfaatan SDA, masih kurangnya regulasi (PERDA) sebagai landasan hukum untuk memberikan jaminan dan kepastian usaha, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara berkesinambungan mengembangkan diri sesuai dengan usaha yang dilaksanakannya. Namun demikian upaya sungguh-sungguh untuk membangun Kota Ambon mulai terlihat, hal ini tentunya berpengaruh secara positif terhadap perbaikan kondisi perekonomian Kota Ambon. Kenyataan ini ditunjukkan dengan makin membaiknya indikator-indikator makro ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat hingga mencapai 5,84% pada tahun 2005, laju inflasi yang cukup moderat karena masih dibawah angka inflasi nasional, dan para investor semakin membuka aksesnya ke Kota Ambon, walaupun disisi lain tingkat pengangguran masih cukup tinggi, dan jumlah penduduk miskin masih belum mampu ditekan. Kondisi perekonomian yang berkembang cukup positif ini,

hendaknya disikapi secara tepat dengan menyiapkan dan makin memantapkan kerangka landasan yang semakin kuat sebagai suatu daya pikat guna menstimulasi meningkatnya dinamika ekonomi Kota Ambon sebagai pusat aktivitas ekonomi untuk Provinsi Maluku bahkan Regional. Dari aspek ekonomi, banyak faktor dominan yang menentukan kebutuhan untuk kelancaran proses pembangunan perekonomian Kota Ambon. Jika dilakukan identifikasi dan dirumuskan menurut prioritas, maka faktor-faktor determinan atau penentu pembangunan kedepan yang dapat dianggap sebagai isu-isu pokok sebagai kebutuhan pembangunan Kota Ambon pada tahun 2008 adalah :

- Penyebaran infrastruktur ekonomi secara merata sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas ekonomi kawasan.
- Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, termasuk mengembangkan semangat kewirausahaan.
- Optimalisasi sumber daya alam dan diversifikasi usaha, termasuk Home Industry.
- Penciptaan iklim usaha yang kondusif termasuk dukungan regulasi penunjang sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

C. BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN, HUKUM DAN HAM

Di Bidang Politik, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan babak baru bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehadiran sejumlah ketentuan normatif yang terkait dengan pilkada secara langsung, karena adanya tuntutan agar aspirasi politik masyarakat dapat disalurkan secara langsung dalam memilih Kepala Daerah. Namun dalam pelaksanaannya sering menimbulkan konflik kekerasan, beberapa faktor mendasar yang menjadi penyebabnya adalah belum maksimalnya sosialisasi peraturan dan per Undang-Undang secara merata kepada masyarakat, masih lemahnya lembaga penyelenggara pilkada dalam implementasi UU tersebut secara adil dan demokratis, serta masih minimnya pendidikan politik masyarakat. Politik identitas untuk memobilisasi masyarakat berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, kelompok menjelang Pilkada di Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap kehidupan sosial politik di Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku. Fenomena politik seperti ini mempunyai tingkat sensitifitas dan kerentanan yang cukup tinggi berdasarkan fakta sosial kemasyarakatan yang ada : pertama, realitas multi kulturalisme, yaitu Maluku yang multi etnik religius dan hidup dalam realitas tradisi-tradisi kecil (*the little tradition*). Kedua, stigma kolektif dan segregasi sosial sebagai dampak dari konflik sosial, merupakan ruang psikologis yang sangat sensitif untuk dipolitisasi dan eksploitasi. Pada aspek lain, minimnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi sebagai landasan pijak dalam rangka implementasi kedaulatan rakyat akan berdampak pada kemampuan mengartikulasikan dan menyalurkan aspirasi. Demikian juga dengan kualitas koordinasi dan pelayanan lembaga-lembaga politik di tingkat lokal. Kondisi seperti ini kurang didukung oleh lembaga pers daerah yang diharapkan dapat berfungsi maksimal sebagai lembaga pers otonom, independent untuk mengkomunikasikan berbagai kepentingan politik kepada masyarakat.

Menyadari realitas multikulturalisme sebagai suatu keniscayaan (given), maka melakukan transformasi pemahaman dan kesadaran tentang realitas multikulturalisme dalam kehidupan sosial politik menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan stabilitas sosial dan keamanan yang sudah tercipta di Kota Ambon. Untuk itu perlu ditingkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai multikulturalisme, pengembangan pemahaman terhadap hak dan kewajiban, membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi politik identitas, serta optimalisasi pelayanan publik oleh lembaga-lembaga politik.

Di Bidang Pemerintahan, kewenangan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Ambon dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi Otonomi Daerah di Kota Ambon terus berjalan dengan tetap berpedoman kepada mekanisme yang ditetapkan, walaupun masih terdapat berbagai kekurangan dan atau kelemahan. Namun Pemerintah Kota Ambon tetap berupaya melakukan penyesuaian dan perbaikan melalui perbaikan berbagai strategi kebijakannya. Disadari bahwa otonomi daerah yang berorientasi pada prinsip desentralisasi telah memberi kewenangan bagi Pemerintah Kota Ambon untuk menyelenggarakan peran, tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien. Sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Ambon ialah penguatan kapasitas birokrasi, pemberdayaan dan pelayanan publik baik pada aras kecamatan, Desa/Negeri, Kelurahan termasuk RT/RW. Implikasinya ialah untuk kemandirian pemerintahan di Kota Ambon. Pada tahap pertama, maka untuk mencapai hasil yang maksimal di bidang pemerintahan, dibutuhkan waktu, energi, sumberdaya serta penataan infrastruktur yang memadai demi tertingkatkannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dalam rangka memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat. Pemekaran kecamatan merupakan salah satu pintu masuk untuk mendekatkan pelayanan publik dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai kelengkapan yang diperlukan untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi aparat Pemerintah Kota Ambon di tingkat kecamatan seyogianya memperoleh perhatian yang memadai, sehingga dalam tahun 2008 “ mesin birokrasi” khususnya di setiap kecamatan baru sudah bisa berfungsi sebagaimana diharapkan.

Di Bidang hukum dan HAM, perlu ditingkatkan supremasi hukum yang berkeadilan. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini, disebabkan beberapa faktor antara lain :

- Penegakan hukum belum berjalan secara maksimal;
- Produk hukum yang dihasilkan tidak sesuai kebutuhan jaman (perlu direglasi);
- Peningkatan kapasitas PPNS;
- Perlu ditingkatkan hubungan dengan pihak legislatif, khususnya berkaitan dengan penyediaan PERDA; dan
- Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait maupun masyarakat tentang pelaksanaan HAM.

Jika perangkat penegakan hukum ini dapat teratasi, maka akan mendorong terwujudnya stabilitas sosial keamanan secara berkelanjutan dengan tetap mengutamakan nilai-nilai demokrasi serta penghargaan terhadap Hukum dan HAM.

D. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup hendaknya dilakukan secara berkesinambungan dan saling memperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Untuk itu upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan tujuan mencapai tingkat pertumbuhan dan pemerataan yang memadai dengan tetap memperhatikan terjaganya ketersediaan cadangan sumberdaya alam yang menjamin daya dukung lingkungan dan pelestarian alam. Dalam konteks ini, sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus penopang system kehidupan.



Gambar 2. Kondisi Mangrove di Teluk Ambon

Sumberdaya alam berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dan masih diandalkan dalam pembangunan jangka menengah, hasil perikanan, kehutanan, pertanian, peternakan masih dominan dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) daerah dan penyerapan tenaga kerja. Dilain pihak, kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan jangka pendek, telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif dan ekspansif, sehingga menyebabkan menurunnya potensi sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lingkungan hidup hendaknya dikelola secara seimbang dan berkelanjutan, melalui penerapan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan semacam ambang batas (limit) pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumberdaya alam yang ada didalamnya. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu strategi pemanfaatan ekosistem alamiah sedemikian rupa sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tidak rusak atau terganggu.

Secara umum sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mempunyai peranan sebagai penyedia bahan pangan dan papan bagi masyarakat kota ambon. Produk masing-masing sektor merupakan sumber ekonomi yang patut dikelola secara berkesinambungan, optimal dan lestari dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan serta penanganan limbah rumah tangga maupun limbah industri secara terpadu.

Kota Ambon memiliki daya dukung lahan yang terbatas, sehingga sector-sector yang bertanggung jawab terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hanya berfungsi sebagai pendukung dalam aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan di daerah hendaknya memahami eksistensi sumber daya lokal sebagai dasar kebutuhan pembangunan daerahnya. Dokumen Rencana tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Ambon merupakan landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang kota dapat sinergis dan berkelanjutan.

Dalam RTRWK ditetapkan norma-norma spasial pemanfaatan ruang kota menyangkut pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya serta struktur jaringan pengembangan wilayah termasuk pusat-pusat pemukiman, pola peruntukan dan pemanfaatan ruang lainnya.

Dengan demikian evaluasi terhadap pemanfaatan ruang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya degradasi kualitas lingkungan akibat aktivitas pembangunan di darat, penertiban terhadap proses pemberian ijin, rehabilitasi lingkungan perkotaan yang disesuaikan dengan daya dukung lahan serta peninjauan kembali sistem penghijauan.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

A. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Dari gambaran kondisi aktual di atas maka isu-isu pokok di Bidang Sosial Budaya ditampilkan dalam bentuk matriks seperti pada table berikut.

Tabel 1. Isu pokok Pendapatan dan Pengendalian Penduduk

| KEBIJAKAN | SWP I | SWP II | SWP III | SWP IV | | | |
|---|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP IV | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Peningkatan kemampuan SDM untuk pendataan dan penataan sistim informasi kependudukan | x | x | x | x | x | x | x |
| Diseminasi informasi ttg pentingnya pendataan kependudukan dan kejelasan status hokum kependudukan bagi warga | x | x | x | x | x | x | x |
| Up – dating data dan penyediaan informasi kependudukan | x | x | x | x | x | x | x |

Tabel 2 . Isu Pokok Pengendalian Lingkungan dan Penyehatan Lingkungan

| Kebijakan | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|---|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Dimensi informasi ttg daya dukung lingkungan pemukiman | x | x | x | x | x | x | x |
| Penataan lingkungan pemukiman penduduk | x | x | x | x | x | x | x |
| Diseminasi informasi ttg kesehatan lingkungan pemukiman | x | x | x | x | x | x | x |
| Pengembangan lingkungan pemukiman baru yg sederhana & sehat | | | x | x | x | x | x |
| Penyehatan lingkungan pemukiman s/c fisik dan sosial | X | X | X | X | X | X | X |

Tabel 3. Isu Pokok Penguatan Integrasi Sosial

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|---|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Pengenalan dan penanganan trauma konflik dan trauma social dalam rangka pemulihan psiko-social masyarakat | x | x | x | x | x | x | x |
| Pemberdayaan lembaga-lembaga social budaya dalam rangka penguatan integrasi social | x | x | x | x | x | x | x |
| Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan untuk mendukung penguatan integrasi social | x | x | x | x | x | x | x |
| Peningkatan penyelenggaraan pendidikan orang basudara yang berbasis komunitas | x | x | x | x | x | x | x |
| Fasilitasi peningkatan kemampuan media mendukung dan memperkuat integrasi social | x | x | x | x | x | x | x |

Tabel 4. Isu Pokok Peningkatan Mutu Pelayanan di bidang Pendidikan

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|---|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Pemerataan sebaran peserta s/c seimbang dgn sarana an prasarana pendidikan (regrouping sekolah) | x | x | x | x | x | x | x |
| Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan prasarana pendidikan | x | x | x | x | x | x | x |

Tabel 5. Isu Pokok Perempuan, Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|--|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Peningkatan kapasitas kelompok perempuan usia produktif | x | x | x | x | x | x | x |
| Pemberdayaan kelompok-kelompok minat di kalangan generasi muda | x | x | x | x | x | x | x |
| Pemberdayaan kelompok-kelompok olahraga di kalangan generasi muda | x | x | x | x | x | x | x |
| Pemberdayaan kelompok putus sekolah dan pengangguran di kalangan generasi muda | x | x | x | x | x | x | x |

Tabel 6. Isu Pokok Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|---|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Peningkatan mutu dan perluasan status PUSKESMAS | x | x | x | x | x | x | x |
| Pengembangan pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, berbasis PUSKESMAS | x | | x | | | x | x |
| Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dlm rangka penanggulangan NAPZA dan HIV/AIDS | x | x | x | x | x | x | x |
| Pengadaan regulasi penanggulangan HIV/AIDS | x | x | x | x | x | x | x |

B. BIDANG EKONOMI

Penyebaran infrastruktur ekonomi secara merata akan dapat memacu peningkatan aktivitas ekonomi kawasan. Penyebaran infrastruktur ekonomi meliputi pengembangan pasar-pasar kecamatan, penyediaan dan peningkatan fasilitas ekonomi selain pasar seperti pergudangan dan pelabuhan, peningkatan status pasar gotong royong menjadi pasar grosir, pengembangan pariwisata, peningkatan kegiatan promosi, penataan dan pengembangan lembaga keuangan, pemantapan dan pengembangan kelistrikan dan pemantapan serta pengembangan telematika yang merupakan kelanjutan dari scenario pembangunan tahun 2007.

Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Penguatan ini mencakup penataan dan pembinaan usaha sector informal sesuai peruntukan lahan, peningkatan dan penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi, peningkatan dan penguatan keluarga sebagai unit produksi, peningkatan kualitas SDM baik pelaku usaha sector informal, Koperasi dan UM maupun keluarga secara professional, penataan system pembinaan dan pendampingan, mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha sector informal, Koperasi dan UMKM serta keluarga.

Potensi sumber daya alam yang terbatas mengharuskan pemerintah dan masyarakat kota mengarahkan aktivitas ekonomiu pada sector-sektor sekunder dan tersier yang secara strategis dapat mendukung dinamika ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya pemantapan dan pengembangan agribisnis, diversifikasi usaha pada komoditas-komoditas unggulan baru yang bercirikan kedaerahan (lokal), termasuk Home Industry, karena dengan pengembangan komoditas-komoditas unggulan ini dapat memperkokoh struktur ekonomi Kota Ambon, terutama fundamen makro ekonominya,

Penciptaan iklim usaha yang kondusif termasuk penataan regulasi dan perijinan usaha yang mendukung penanaman infestasi, baik swasta maupun pemerintah yang berasal dari dalam dan luar negeri, pembinaan dan peningkatan pelayanan public, merupakan kebutuhan dalam kerangka mengembangkan lingkungan bisnis yang memadai di Kota Ambon. Dengan posisi Kota Ambon sebagai pusat aktivitas ekonomi dan transit bisnis, diperlukan pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang representatif.

Isu-isu yang telah dijelaskan diatas kemudian dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan pembangunan, disesuaikan dengan karakteristik dan peruntukan masing-masing wilayah pengembangan sebagaimana terlihat dalam table berikut ini :

Tabel 7. Isu Pokok Penyebaran Infrastruktur ekonomi Secara merata

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | SWP III | | SWP VI |
|--|--------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Penataan dan pengembangan pasar-pasar kecamatan dan saluran distribusi | | x | | x | | x | x |
| Penyediaan dan peningkatan fasilitas ekonomi selain pasar, spt perdagangan, dan kepelabuhanan | x | x | x | x | x | x | x |
| Peningkatan status pasar gotong royong menjadi pasar grosir | x | | | | | | |
| Pengembangan komoditas unggulan berbasis local (sector perikanan, pertanian kehutanan dan perindustrian) | x | x | | | | | |
| Penataan dan pengembangan industri pariwisata | x | x | | x | x | x | |
| Peningkatan kegiatan promosi | x | | | | | | |
| Penataan dan pengembangan lembaga keuangan | x | | | | | | |
| Pemantapan dan pengembangan kelistrikan | | | x | | x | | x |
| Pemantapan dan pengembangan telematika (Wamet/Hot spot) | x | x | | x | x | x | |

Tabel 8. Isu Pokok Penguatan kelembagaann ekonomi masyarakat

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|--|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Penataan dan pembinaan usaha sector informal sesuai peruntukan lahan | x | | x | | | | |
| Peningkatan dan penguatan kelembagaan UKM dan Koperasi | x | x | x | x | x | x | x |
| Peningkatan dan penguatan keluarga sbg unit produksi | x | x | x | x | x | x | x |
| Peningkatan kualitas SDM, baik pelaku usaha sector informal, Koperasi dan UKM maupun keluarga s/r professional | x | x | x | x | x | x | x |
| Penataan sistim pembinaan dan pendampingan | x | x | x | x | x | x | x |
| Mempermudah akses permodalan dan pasar bagi pelaku usaha sector informal, Koperasi dan UKM serta keluarga | x | x | x | x | x | x | x |

Tabel 9. Isu Pokok Optimalisasi sumber daya alam dan diversifikasi usaha

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|---|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Pemantapan dan pengembangan agribisnis | | x | x | x | x | x | x |
| Diversifikasi usaha untuk menciptakan komoditas unggulan baru | x | x | x | x | x | x | x |

Tabel 10. Isu Pokok Penciptaan iklim usaha yang kondusif termasuk dukungan regulasi penunjang

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|--|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Pengembangan lingkungan bisnis | x | x | x | x | x | x | x |
| Penataan regulasi dan perijinan | x | | | | | | |
| Pembinaan dan peningkatan pelayanan Publik | x | | | | | | |

C. BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN, HUKUM DAN HAM

Berdasarkan kondisi actual sebagaimana telah dijelaskan di depan maka dapat diidentifikasi sejumlah isu pokok sebagai berikut :

- Pengembangan pendidikan politik dan kelembagaan politik
- Pemantapan kapasitas lembaga pemerintah politik
- Pemantapan system Pelayanan Publik
- Pengembangan kerjasama dengan Institusi internasional
- Pemantapan koordinasi dalam rangka Pelayanan Hukum dan HAM

Merujuk pada isu-isu pokok di atas, maka penjabarannya ke dalam berbagai kebijakan dapat disajikan di bawah ini.

Tabel 11. Isu Pokok Pengembangan pendidikan politik dan kelembagaan politik

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|---|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Peningkatan kesadaran politik masyarakat yang menghargai nilai-nilai multikulturalisme | x | x | x | x | x | x | x |
| pengembangan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kewajibannya sbg warga Negara dan anggota masyarakat dalam mentaati hukum dan perundangan yang berlaku | x | x | x | x | x | x | x |
| Peningkatan fungsi-fungsi koordinasi kelembagaan politik | x | | | | | | |

Tabel 12. Isu Pokok Pemantapan kapasitas lembaga Pemerintah Kota

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|--|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Penguatan Tugas pokok dan fungsi pemerintahan | x | x | x | x | x | x | x |
| Optimalisasi sistim koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS) lintas institusi | x | x | x | x | x | x | x |
| Peningkatan kualitas lingkungan kerja | x | x | x | x | x | x | x |
| Penyediaan infrastruktur pemerintahan | | | x | x | x | | |
| Penyelesaian sertifikasi tanah, asset Pemkot | x | x | x | x | x | x | x |

Tabel 13. Isu Pokok Pemantapan Sistim Pelayanan Publik

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|--|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Peningkatan sarana dan pasarana | x | x | x | x | x | x | x |
| Penguatan kapasitas sumber daya manusia | x | x | x | x | x | x | x |
| Perbaikan tata laksana/ mekanisme layanan public | x | x | x | x | x | x | x |
| Penataan regulasi dan deregulasi | x | x | x | x | x | x | x |
| Pendelegasian kewenangan tertentu pada tingkat kecamatan untuk peningkatan kualitas pelayanan public | x | x | x | x | x | x | x |

Tabel 14. Isu Pokok Pengembangan kerjasama dengan Institusi Internasional

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|--|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Peningkatan dan perluasan hubungan kerjasama bilateral Kota bersaudara | x | x | x | x | x | x | x |
| Peningkatan hubungan kerjasama lembaga donor internasional | x | x | x | x | x | x | x |

Tabel 15. Isu Pokok Pemantapan Koordinasi dalam rangka Pelayanan Hukum dan HAM

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|---|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Peningkatan kapasitas hukum bagi aparaturnya (PPNS dan Satpol PP) | x | | | x | x | x | x |
| penataan regulasi dan deregulasi hukum yang berkapasitas dan berkeadilan | x | x | x | x | x | x | x |
| Peningkatan kegiatan sosialisasi HAM dan hak-hak masyarakat adapt kepada masyarakat | x | x | x | x | x | x | x |
| Peningkatan koordinasi dgn instansi terkait/masyarakat ttg HAM | x | x | x | x | x | x | x |

D. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Berdasarkan kondisi aktual bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup maka isu-isu pokok untuk kebutuhan pembangunan Kota Ambon Tahun 2008 sebagai berikut :

- Peningkatan produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan
- Rehabilitasi ekosistem pesisir dan penguangan
- Pengelolaan sampah secara terpadu
- Pengadaan regulasi

Dari isu-isu pokok tersebut kemudian dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan pembangunan, disesuaikan dengan karakteristik dan peruntukan masing-masing wilayah seperti terlihat dalam tabel berikut :



Gambar 3 : Suasana Udara di Kota Ambon, Siang hari

Tabel 16. Isu pokok Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|---|--------|---------|---------|----------|------------------|-------------|-----------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana produksi | Tani | Tani | Tani | | Tani Ternak lkan | Tani Ternak | Tani lkan |
| Penyediaan bibit, pupuk dan fasilitas penunjang produksi | sda | sda | sda | | | sda | sda |
| Peningkatan teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan | sda | sda | sda | | sda | sda | sda |
| Peningkatan teknologi Budidaya, Pertanian dan Perikanan | sda | sda | sda | | Tani lkan | Tani | Tani lkan |

Tabel 17. Isu Pokok Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pegunungan

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|--|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Optimalisasi fungsi ekosistem untuk pengembangan dinamika ekonomi | x | x | x | x | x | x | x |
| Rehabilitasi wilayah pegunungan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan air bersih | x | | | x | | | x |
| Rehabilitasi saluran drainase disesuaikan dengan ketersediaan tata ruang | x | | x | x | | | |
| Penataan wilayah pemukiman sesuai dengan peruntukan ruang | x | x | x | x | x | x | x |

Tabel 18. Isu Pokok Pengelolaan Sampah Secara Komprehensif

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|---|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Peningkatan kesadaran masyarakat ttg penanganan sampah | x | x | x | x | x | x | x |
| Pemetaan dan penyediaan sarana pendukung pengelolaan sampah | x | x | x | x | x | x | x |
| penguatan aparatur pemerintah dalam penanganan dan pengelolaan sampah | x | x | x | x | x | x | x |
| Pemantapan pengembangan sistem pengelolaan sampah yg terpadu dan higienis | x | x | x | x | x | x | x |

Tabel 19 : Isu Pokok Pengadaan Regulasi

| KEBIJAKAN | SWP I | | SWP II | | | SWP III | SWP IV |
|--|--------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| | SWPP I | SWPP VI | SWPP II | SWPP III | SWPP V | SWPP VII | SWPP IV |
| Peningkatan kesadaran masyarakat ttg aturan perundang-undangan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan | x | x | x | x | x | x | x |
| Penguatan aparatur pemerintah dalam penerapan aturan perundang-undangan | x | x | x | x | x | x | x |
| Pemantapan penerapan sanksi | x | x | x | x | x | x | x |

BAB III A I R

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting, yang paling berharga dan sebagai aset yang universal sebagai sistem pendukung kehidupan makhluk hidup (manusia, tumbuhan hewan), dan air juga merupakan bagian penting dalam sistem sosio-ekologi, oleh karenanya air harus tetap tersedia untuk keperluan makhluk hidup.

Dampak dari perubahan iklim global sehingga terjadi anomaly iklim yang sangat signifikan di berbagai wilayah dan aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya air yang tidak terkendali, juga menyebabkan ketersediaan air di bumi semakin lama semakin langka.

Pada abad ke 20 telah terlihat dan dirasakan perkembangan penggunaan air yang fenomenal. Penduduk dunia telah berkembang tiga kali lipat sedangkan penggunaan air untuk kehidupan manusia telah berkembang enam kali lipat. Para ahli SDA telah memperingatkan bahwa dunia akan menghadapi suatu masa "Water Shock" yang mana dampaknya akan melebihi dampak dari krisis minyak. Para ahli juga khawatir bahwa kekurangan air akan sangat akut di masa mendatang yang dalam perang dunia mendatang akan menyebabkan terjadinya perselisihan/percekcokan mengenai pembagian sumber daya air antara berbagai Negara.

Dalam kajian global, Lembaga Internasional seperti " International Water Management Institute " (IWMI) meramalkan bahwa pada tahun 2025 sepertiga penduduk dunia akan mengalami kelangkaan air sangat parah. Di Indonesia tampaknya kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menyaksikan terjadinya kelangkaan air tersebut. Hal ini dapat dilihat secara mudah dari makin meluasnya ancaman kekeringan di berbagai wilayah, penurunan muka air. Di daerah yang berdekatan dengan daerah perkotaan sudah banyak situ-situ sebagai tempat penampung air diurug untuk kepentingan permukiman, selain itu tingkat pencemaran air yang tinggi, pemakaian air yang tidak efisien, kelembagaan yang masih lemah dan peraturan perundang-undangan yang kurang memadai juga memperparah keadaan ini. Meskipun secara faktual, Indonesia termasuk sepuluh besar Negara kaya air, namun krisis air diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari kesalahan pengelolaan.

Air yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, baik manusia, binatang maupun tanaman. Air tidak saja untuk diminum namun juga untuk mandi, cuci, masak juga untuk keperluan agrikultur, industri, transportasi, perikanan sebagai media pembuangan limbah cair domestik dan industri sehingga air memiliki potensi yang sangat tinggi dari berbagai segi kehidupan manusia. Kebutuhan akan air bukan saja dari segi kuantitas tetapi juga dari segi kualitas.

Konsumsi akan air minum mutlak memerlukan air bersih sesuai standart. Air mandi, cuci atau masakan tidak boleh kotor apalagi tercemar limbah industri karena hal itu akan dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan tubuh terlebih pada mata dan kulit yang terkena secara langsung. Air kotor yang tergenang pun dapat mengundang daur hidup nyamuk sehingga genangan-genangan air perlu dihindari.



Gambar 4 : Kondisi Laut di Teluk Ambon Dalam

A. KONDISI AIR DI KOTA AMBON

Kota Ambon yang dilalui oleh beberapa sungai besar namun oleh berbagai aktivitas pembangunan menyebabkan terjadi pendangkalan dan terkadang pada musim kemarau mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini juga mempengaruhi kondisi lingkungan terutama ketersediaan air bagi kehidupan dan konsumsi masyarakat. Berikut ini di lampirkan beberapa sungai yang ada di Kota Ambon sbb :

| Kecamatan | Nama Sungai | Desa/Kelurahan yang dilalui | Panjang (Km) |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Sirimau | Way-Ruhu | Hative Kecil | 9,10 |
| | Way-Batu Merah | Karang Panjang-Batu Merah | 4,25 |
| | Way-Tomu | Karang Panjang-Uritetu | 4,20 |
| | Way-Batu gajah | Batu Gajah-Honipopu-Ahusen-Urimessing | 3,10 |
| | | | |
| Nusaniwe | Way-Batu Gantung | Mangga dua-Batu gantung-Waihaong | 1,50 |
| | Way- Illa | Amahusu | 1,50 |
| | | | |
| Teluk Ambon Baguala | Way-Tonahitu | Passo | 6,00 |
| | Way-Heru | Waiheru | 3,50 |
| | Way-Lela | Rumah Tiga | 7,80 |
| | Way-Pia Kecil | Hative Besar | 4,50 |
| | Way-Pia Besar | Hative Besar | 6,00 |
| | Way-Webi | Hative Besar | 2,50 |
| | Way-Wesa | Hative Besar | 2,80 |
| | Way-Lawa | Tawiri | 9,50 |
| | Way-Sikula | Laha | 15,50 |

1. Sarana Air Bersih

Cakupan sarana air bersih yang dimiliki oleh penduduk Kota Ambon pada umumnya menggunakan sarana PDAM dan DSA sedangkan lainnya menggunakan sumur gali, sumur bor dan sumur arthesis. Jika dilihat dari kacamata kesehatan maka sarana air bersih dari PDAM dan DSA memenuhi persyaratan air bersih bagi kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia karena sudah melalui proses penyaringan dan pemeriksaan dan sesuai dengan standart kesehatan yang dibutuhkan, sedangkan sumur gali, sumur bor dan air arthesis belum dapat dikatakan memenuhi persyaratan dan standart kesehatan karena belum melalui proses penyaringan dan pemeriksaan.

Pada daerah sepanjang sungai (DAS) yang ada di Kota Ambon penggunaan sarana air bersih PDAM dan DSA belum sepenuhnya dan seluruhnya digunakan oleh penduduk/masyarakat tetapi sebagian besar menggunakan sarana air bersih yang mudah tercemar atau yang belum melalui proses pemeriksaan dan penyaringan.

2. Kualitas Air Bersih

Kualitas air bersih di Kota Ambon pada umumnya dan secara makro masih dikatakan dalam kategori memenuhi syarat kesehatan karena belum mengalami pencemaran namun secara kuantitas mengalami penurunan yang sangat signifikan. Untuk kebutuhan konsumsi masyarakat baik air minum, mandi cuci juga masih memenuhi standart kesehatan.

Secara fisik kualitas sample air bersih di Kota Ambon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan Kualitas Air.

Secara kimia parameter Cadmium (Cd) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

Secara Bakteriologi Kualitas sampel air bersih tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990.

3. Kualitas Air Badan Air

Kualitas fisik air badan air sepanjang sungai dalam Kota Ambon pada umumnya menurun dari hulu sampai ke hilir mulai dari air jernih sampai seperti air buangan di hilir. Hal ini juga disebabkan karena sepanjang sungai kebanyakan telah tercemar dengan hasil buangan masyarakat seperti sampah, aliran air rumah tangga yang mengarah ke badan air dan juga sediment lumpur. Hal ini menyebabkan kualitas air badan air menjadi menurun.

Namun jika dikaji secara ilmiah dengan hasil pengujian laboratorium dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri maka secara fisik kualitas air badan air di Kota Ambon masih memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Secara kimia parameter BOD, parameter COD dan parameter DO tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan pemerintah Nomor : 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air.

Secara bakteriologi kualitas air badan air di Kota Ambon tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran air.

B. PENYEBAB

Sumber daya air merupakan hal yang penting dipikirkan. Hal ini disebabkan karena air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kelangkaan sumber air disebabkan oleh banyak factor yang mempengaruhi antara lain :

1. Terjadi pembukaan lahan untuk pertanian secara besar-besaran dan perladangan berpindah-pindah.
2. Terjadi pembukaan lahan secara besar-besaran untuk pemukiman penduduk.
3. Adanya Illegal Logging / penebangan liar yang tidak disertai penanaman kembali atau penghijauan atau hutanisasi.

C. DAMPAK YANG TERJADI

Dampak yang terjadi dari semua penyebab akibat beberapa hal diatas adalah :

1. Terjadinya erosi (Run off) atau aliran permukaan.
2. Terjadinya kelangkaan air/ penurunan debit air permukaan.
3. Terjadinya penurunan permukaan air pada Daerah Aliran sungai.
4. Terjadinya banjir.
5. Terjadinya kekeringan.

D. RESPONS TERHADAP DAMPAK YANG TERJADI

Menindaklanjuti penyebab dan dampak yang terjadi terhadap permasalahan air dan kelangkaannya maka ada beberapa tindakan yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Kawasan Sumber mata Air.
2. Pelaksanaan kegiatan Penanaman sejuta pohon.
3. Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Nasional (GERHAN).
4. Kegiatan penghijauan.
5. Pelarangan Illegal Logging
6. Menindak setiap orang atau badan usaha yang tidak memenuhi peraturan pemerintah.
7. Setiap kegiatan pembangunan harus melaksanakan Amdal atau UKL/UPL.

BAB IV. U D A R A

Udara merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan, tanpa udara makhluk hidup di bumi tidak bisa hidup. Seiring dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, terutama di bidang industri dan juga transportasi maka kualitas udara mengalami perubahan. Perubahan kualitas udara pada umumnya disebabkan karena pencemaran udara yaitu masuknya zat pencemar (berbentuk gas dan partikel/aerosol) kedalam udara yang menyebabkan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Masuknya zat pencemar kedalam udara dapat terjadi secara alamiah, misalnya dari asap gunung berapi, debu meteorit dan penguapan garam dari laut. Selain itu bias juga karena kegiatan manusia misalnya akibat kegiatan industri, penggunaan transportasi, pembuangan atau pembakaran sampah dan kegiatan rumah tangga.

Pencemaran udara dapat menyebabkan adanya gangguan kesehatan seperti pemapasan, iritasi pada mata dan kulit serta penyakit lainnya. Selain itu juga bias mengakibatkan gangguan jarak pandang (visibilitas), yang bias mengakibatkan kecelakaan lalu lintas misalnya asap kebakaran hutan yang dapat mengganggu dalam lalu lintas udara maupun darat, lebih jauh lagi, pencemaran udara juga berdampak terhadap perubahan iklim yang terjadi karena adanya pemanasan global. Tak kalah dirugikan pada manusia usia produktif dengan kondisi lingkungan udara yang tercemar akan mengganggu produktivitas sehari-hari jika daya tahan tubuh rentan yang akhirnya menuai penyakit.

Dalam kehidupan dan kesibukan setiap hari, umumnya kita kurang memperhatikan bahaya polusi udara yang mengintai yang ketika dihirup pun tidak terasa. Logam berat diam-diam tersimpan didalam darah warga kota/masyarakat yang setiap hari berpacu dengan kehidupan di luar rumah.

Kita perlu berhati – hati dengan udara karena dengan udara juga dapat merusak masa depan kita dan anak cucu kita, sehingga langit biru merupakan dambaan setiap insan manusia dan makhluk hidup yang hidup di jagat raya ini.

A. KONDISI UDARA KOTA AMBON.

Sesuai dengan Peraturan pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian pencemaran Udara yang mengatakan bahwa Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lainb kedalam udara ambient oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 di atas maka dapat digambarkan kondisi Udara Kota ambon, bahwa udaradi Kota Ambon masih memenuhi persyaratan kesehatan atau belum terkontaminasi dengan polusi karena berbagai factor berikut :

1. Tidak ada perusahaan-perusahaan besar yang mengeluarkan asapnya secara kontinyu.
2. Jumlah kendaraan umum maupun pribadi yang masih rendah sehingga tidak menimbulkan asap secara kontinyu.
3. Topografi Kota Ambon yang bergunung/tidak rata sehingga arus angin tidak menetap tetapi selalu bergerak.

4. Sampah sudah dikelola pada Instalasi pengolahan sampah terpadu sehingga tidak menimbulkan bau sebagai sumber polusi.
5. Tidak ada logam berat yang mengandung plumbum (Pb) atau disebut Timbel yang menimbulkan polusi udara.



Gambar 5 : Kondisi Pesisir Pantai Desa Galala

B. PENYEBAB

Oleh karena udara di Kota Ambon masih memenuhi persyaratan seperti yang di isyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Kota Ambon maka dapat dikatakan bahwa udara kota ambon tidak tercemar dan masih bisa di hirup oleh mahluk hidup maupun manusia/masyarakat yang bermukim di Kota Ambon dan sekitarnya.

C. DAMPAK

Udara yang bersih dengan menunjukan tanda-tanda positif seperti langit biru menimbulkan kesan yang indah dan asri bagi orang yang menikmati dan menghirupnya. Udara Kota Ambon yang masih memenuhi syarat kesehatan ini dapat ditandai dengan tidak banyak penduduk yang menderita penyakit yang berhubungan dengan polusi udara seperti : ISPA, Gatal-gatal, dll.

D. RESPONS TERHADAP PERMASALAHAN

Melihat kondisi udara yang masih memenuhi standart baku mutu lingkungan nasional maka diharapkan masyarakat baik para pengusaha maupun individu dapat menjaga lingkungannya dengan baik sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati dan menghirup udara segar dan bersih setiap saat sehingga dapat menghasilkan/melahirkan generasi yang sehat jasmani dan rohani demi masa depan anak-anak bangsa.

BAB. V LAHAN DAN HUTAN

Lahan dan hutan berperan penting dalam menopang kehidupan dunia. Hutan memberikan perlindungan terhadap kestabilan tanah, iklim local, hidrologi tanah dan efisiensi siklus hara di antara tanah dan vegetasi. Hutan juga dapat menyerap CO₂ di atmosfer sehingga mengurangi pemanasan global. Hutan juga menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Dilihat dari segi ekonomi, hutan tidak saja menghasilkan kayu industri dan kayu bakar, melainkan juga sebagai obat-obatan dan tanaman bermanfaat lainnya.

Upaya untuk menanggulangi persoalan lahan kritis yang terus berkembang telah mendapat perhatian Pemerintah sejak Tahun 1951 dengan nama Gerakan Karang Kritis, Program RHL ini berkembang terus menerus dengan berbagai macam nama kegiatan/program namun program ini dianggap belum berhasil sehingga pemerintah melalui departemen Kehutanan kembali meluncurkan Program rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RLN / GERHAN) yang secara Nasional di mulai Tahun 2003 dan di Propinsi Maluku juga Kota Ambon di mulai dari tahun 2004.

a. Kondisi Lahan dan Hutan Kota Ambon

Di Kota Ambon masalah lahan dan hutan juga merupakan masalah yang sangat penting dan mendasar karena mengalami berbagai ancaman kepunahan oleh berbagai aktivitas baik oleh manusia maupun aktivitas pembangunan lainnya.

Untuk Kota Ambon yang memiliki luas hutan 12.579 Ha dengan luas lahan 11.863 Ha yang tersebar pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sirimau, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Ieitimur Selatan. DAS yang ada di Kota Ambon adalah DAS Wae Hapu Batu Merah dengan luas Lahan Kritis dalam Kawasan 2.963 Ha dan Luar Kawasan 8.900 Ha.



Gambar 6 :
Kondisi Lahan Akibat
Pembukaan Lahan
Bagi Pembangunan
Perumahan

b. Penyebab terjadi Kerusakan Lahan dan Hutan

Penyebab terjadi kerusakan lahan dan hutan di Kota Ambon antara lain :

- a. Adanya perladangan berpindah.
- b. Terjadinya kebakaran hutan.
- c. Adanya penebangan / pembalakan liar.
- d. Adanya pemukiman baru yang masuk dalam kawasan lindung.
- e. Penambangan Galian C pada Kawasan lindung.
- f. Status kepemilikan lahan / tanah.



Gambar 7 : Kondisi Lahan Akibat Pembukaan yang Tidak Sesuai AMDAL

c. Dampak yang terjadi akibat Kerusakan lahan dan Hutan

Dampak yang terjadi sebagai akibat kerusakan hutan adalah sebagai berikut :

- a. Bertambahnya lahan kritis dan produktivitas tanah/lahan menurun.
- b. Terjadi penurunan/berkurangnya debit air.
- c. Aliran permukaan (Run off) akibat dari penebangan liar menyebabkan terjadi erosi, banjir, sedimentasi di Daerah Aliran Sungai dan hilir sungai (perbatasan sungai dan laut).
- d. Porositas tanah mikro maupun makro akan terganggu sehingga infiltrasi air secara vertikal makin kecil.

d. Respons terhadap Dampak yang terjadi

Respons dari dampak yang terjadi sebagai akibat dari kerusakan hutan adalah :

- a. Melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Pemerintah Kota maupun Organisasi Pencinta Alam.
- b. Memberikan motivasi melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya hutan dan lahan bagi manusia dan masyarakat.
- c. Membatasi pemukiman baru pada kawasan hutan lindung.
- d. Melakukan operasi gabungan, pengawasan terhadap penebangan liar, kebakaran hutan dll.



Gambar 8 : Sedimentasi di Pantai Lateri Akibat Pembukaan Lahan Untuk Perumahan

BAB. VI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pada prinsipnya pengelolaan keragaman hayati menuntut untuk melaksanakan semua tindakan pengelolaan yang bertanggung jawab dalam artian melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara optimal, adil dan berkelanjutan yang oleh masyarakat baik seluruh Indonesia maupun di Maluku dan khususnya di Kota Ambon membutuhkan kepedulian yang tinggi, berdaya guna, mandiri dan cerdas yang pada akhirnya menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a. Kondisi Keanekaragaman Hayati di Kota Ambon

Sama seperti Kota / Kabupaten lain di Indonesia, Kota Ambon juga memiliki berbagai situasi dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan dan aktivitas keanekaragaman hayati yang pada dasarnya didominasi dari sector pertanian. Sektor pertanian yang masih memiliki peranan yang sangat strategis yang sesuai dengan kondisi geografis serta kemampuan lahan maka usaha pertanian rakyat yang mendominasi sehingga lebih mengarah kepada pengembangan tanaman palawija dan hortikultura. Hal ini terlihat bahwa sampai dengan tahun 2006 dari luas keseluruhan tanah kering 35.944.80 Ha di wilayah Kota Ambon 28.343.72 Ha (78,85%) digunakan untuk usaha pertanian sedangkan 7.600,90 Ha bukan untuk usaha pertanian.

Produksi tanaman palawija di Kota Ambon Tahun 2006 tercatat :

- Ubi Kayu 4.919,14 Ton
- Ubi Jalar 480,61 Ton
- Kacang Tanah 118,15 Ton
- Jagung 201,80 Ton

Produksi Tanaman Hortikultura di Kota Ambon Tahun 2006 tercatat :

- Buah-buahan 1.844,64 Ton
- Sayur-sayuran 5.222,13 Ton
- Bumbu-bumbuan 128,44 Ton

Untuk produksi komoditi buah-buahan peningkatan luas areal diikuti oleh peningkatan produksi. Untuk komoditi sayur-sayuran penurunan luas areal sebesar 28,24 % justru diikuti oleh peningkatan produksi sebesar 2,92 %.

Dari sisi Peternakan, populasi ternak tahun 2006 tercatat :

- Ternak besar yaitu Sapi 623 ekor dan Kerbau 61 ekor.
- Ternak kecil yaitu Kambing 735 ekor dan Babi 1.142 ekor.
- Unggas yaitu Itik 862 ekor dan Ayam Kampung 41.367 ekor.

b. Penyebab Kerusakan Keragaman Hayati di Kota Ambon

Penyebab terjadi kerusakan keragaman hayati di Kota Ambon tidak terlepas dari berbagai faktor sebagai berikut :

- Adanya perladangan berpindah (Shifting cultivation)
- Adanya penggunaan bahan kimia oleh petani berupa pupuk organik maupun pestisida yang berlebihan.
- Sistem budidaya yang tidak berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

c. Dampak dari Kerusakan Keragaman hayati di Kota Ambon

Dampak yang terjadi akibat berbagai penyebab diatas adalah sebagai berikut :

- Terjadi erosi akibat perladangan berpindah-pindah.
- Terjadi recurdensi pada tanaman (penurunan daya tahan/kekebalan tubuh tanaman) sehingga tanaman tidak mampu bertahan terhadap serangan hama dan penyakit



Gambar 9 : Kondisi Keanekaragaman Hayati

d. Respons terhadap Dampak yang Terjadi.

Respons terhadap dampak yang terjadi berupa saran tindak adalah sebagai berikut :

- Melakukan pendekatan kearifan local yang selama ini di Maluku dijalankan sistem dusun (Agroforestry).

- Penggunaan pupuk organik.
- Penggunaan sistim Pengendalian Hama Terpadu, dimana Pestisida dipergunakan sebagai alternatif terakhir.



Gambar 10 : Suasana Kota Ambon di Siang Hari

BAB VII. PESISIR DAN LAUT

Daerah Kota Ambon dalam lingkup wilayah pulau kecil, Ambon, memiliki spesifikasi kuat dengan pembangunan yang mengarah pada pemanfaatan potensi yang ada. Dukungannya ialah pesisir dan lautnya. Walaupun demikian fungsi Kota sebagai pusat pelayanan tidak dapat dihindari mengingat fungsinya yang besar sebagai pusat pelayanan Propinsi dan Kota.

Bertolak dari spesifikasi orientasinya pada pesisir dan laut, maka dukungan pengelolaan potensi untuk pembangunan di daerah Kota Ambon, sangat membutuhkan data dan informasi potensi pesisir dan laut. Data dan informasi potensi sumber daya pesisir dan laut sangat bermanfaat dan dibutuhkan dalam penentuan kebijakan pemanfaatan potensi maupun infestasi.

Gambaran wilayah pengembangan pesisir diarahkan pada 4 satuan wilayah ekologis yang teridentifikasi antara lain : Teluk Ambon Dalam (TAD), Teluk Ambon Luar (TAL), Teluk Baguala (TB) dan Pesisir Selatan Kota Ambon (PSKA).

Beberapa komponen pendukung sumber daya pesisir dan laut antara lain : lingkungan biofisik (geomorfologi dan oseanografi), termasuk habitat/ekosistem utama (mangrove, padang lamun, terumbu karang), di pesisir dan laut sumber daya ikan (pelagis kecil, pelagis besar, demersal), sumber daya ikan karang, sumber daya flora bentik (moluska, ekhinodermata, krustacea, rumput laut) dan fauna potensi perikanan budidaya, perikanan, pariwisata, bahari, demografi desa, kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

a. Kondisi Pesisir dan laut Kota Ambon

Daratan pesisir Kota Ambon berada pada posisi 128° 00' 42" BT – 128° 16' 04" BT dan 3° 33' 47" LS – 3° 43' 50" LS di jahirah Leihitu dan posisi 128° 04' 56" BT – 128° 17' 30" BT dan 3° 38' 32" LS – 3° 47' 06" LS di Jahirah Leitimur. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, Kota Ambon mempunyai luas 377 km² atau 2/5 dari luas wilayah pulau Ambon. Menurut Survey tata guna tanah tahun 1980 Luas Wilayah daratan kota Ambon sebesar 359,45 km². Hasil analisis Citra Landsat E TM 7+ dasar dengan menggunakan criteria batas wilayah administratif ke arah laut sejauh 4 mil menunjukkan luas perairan kota sebesar 405,4 km².



Gambar 11 : Kondisi Pesisir Pantai Desa Galala Kota Ambon

Secara ekologis, wilayah Kota Ambon dibagi atas 4 wilayah ekologis sebagai berikut :

1. Teluk Ambon Dalam (TAL) dicirikan oleh daerah teluk semi tertutup yang relatif tenang dan digolongkan sebagai salah satu bentuk perairan estuari, bermuara beberapa sungai besar dan kecil, serta didominasi oleh komunitas lamun dan bakau yang dipisahkan dengan Teluk Ambon Luar oleh ambang Galala Poka yang sempit
2. Teluk Ambon Luar (TAL) dicirikan oleh daerah teluk yang berbentuk corong dan terbuka ke arah Barat Pulau Ambon dengan kondisi perairan yang relatif dinamis karena masih dipengaruhi oleh massa air laut Banda, didominasi oleh komunitas Terumbu Karang.
3. Teluk Baguala (TB) dicirikan oleh daerah teluk yang berbentuk corong dan terbuka ke arah Timur Pulau Ambon dengan kondisi perairan yang relatif dinamis karena masih dipengaruhi oleh massa air laut Banda, didominasi oleh komunitas terumbu karang.
4. Pesisir selatan Kota Ambon (PSKA) merupakan daerah terbuka yang sangat dinamis karena dipengaruhi langsung oleh massa air laut Banda, dengan tipe pantai berbatu yang didominasi oleh komunitas algae.

b. Kondisi Fisik Pesisir dan Laut Kota Ambon



Gambar 12 :
Kondisi Pantai Desa Galala
Kota Ambon Saat Air Surut.

Iklm

Perairan Kota Ambon memiliki tipe iklim laut tropis dan iklim musim. Ada 4 musim yang berpengaruh terhadap perairan ini yakni Musim Barat (Desember-Februari), Musim Pancaroba 1 (Maret-Mei), Musim Timur (Juni-Agustus) dan Musim Pancaroba 2 (September-Nopember).

Curah Hujan tertinggi sepanjang tahun terjadi dalam musim Timur (Juni-Agustus), dan terendah dalam Musim Barat (Desember-Februari) angin utara yang bertiup dengan durasi yang cukup lama akan berdampak langsung bagi kestabilan massa air di perairan TAD. Laut akan tampak bergolak hebat akibatnya kekeruhan sepanjang pesisir pantai akan meningkat. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, jumlah bulan basah (CH) > 200 mm/bulan

Hidrologi

Pola aliran air di wilayah Kota Ambon adalah semi dendritik yaitu pola percabangan sungai dimana anak cabang berordo 1,2 terdiri dari 42 sungai di wilayah Teluk Ambon Luar, diantaranya 10 buah adalah sungai besar yang mengalir dari jahirah Leihitu dan jahirah Leitimur dan bermuara di Teluk Ambon yakni : Wae Batu Merah, Wae Ruhu, Wae Batumeja, Wae Batugantung, Wae Tomu, Wae Nitu, Wae Lela, Wae Ami, Wae Hative Besar, Wae Witi, Wae Lawa dan Wae Sikula. Pola drainase di pesisir Selatan Kota Ambon bersifat semi dendritik dengan lebar sungai sempit dan kedalaman air tidak terlampau dalam dengan ketinggian tanggul alam bervariasi dari datar sampai curam.

Suhu

Kondisi suhu perairan di perairan Teluk Ambon Luar (TAL) mengalami fluktuasi secara musiman. Pada Teluk Ambon Dalam faktor yang berperan terhadap fluktuasi nilai suhu air laut dan suhu udara di perairan Teluk Ambon Luar adalah pengaruh daratan, keseimbangan kalor dan massa air di lapisan permukaan serta factor meteorology yakni curah hujan, penguapan, suhu udara, kecepatan angin, penyinaran matahari dan suhu permukaan laut itu sendiri.

Salinitas

Salinitas perairan Teluk Ambon Dalam bervariasi menurut strata kedalaman. Hasil pengukuran salinitas perairan pada Tahun 2003 pada Perairan Teluk Ambon Luar dan Teluk Baguala berkisar antara 29 – 36 ppt pada lapisan permukaan, 32 -37 pada kedalaman 10 meter dan 35 – 37 ppt pada kedalaman 30 – 50 meter.

Arus

Karakteristik arus di perairan Teluk Ambon Dalam merupakan arus pasang surut yang sedikit dipengaruhi arus Laut Banda. Arus non pasang surut yang terdeteksi juga mempengaruhi pola arus pasang surut di persairan TAD, tetapi kecepatannya cukup kecil yakni 11,02 cm/detik pada tepi luar ambang Galala Poka dan 3,58 cm/detik di perairan teluk dalam yang mengarah ke selatan.

Arus yang berkembang di perairan TAL bukan arus pasang surut murni tetapi sedikit dipengaruhi oleh arus yang terjadi akibat pertukaran massa air antara teluk ambon dengan massa air laut banda.

Berdasarkan kondisi fisiografi Teluk Baguala dapat diduga bahwa ada pengaruh arus pasang surut dan arus non pasang surut dari laut banda yang sama-sama berkembang di perairan ini selama satu siklus pasang surut.

Pasang surut

Tipe pasang surut di perairan ambon adalah pasang surut harian ganda, karena terjadi dua kali pasang surut dalam sehari dengan tinggi pasang dan surut bervariasi dalam satu siklus pasang surut.

Gelombang

Gelombang di Teluk Dalam Ambon (TAD) merupakan gelombang angin dimana angin sebagai pembangkit utama, terutama angina barat-barat Daya dan Utara. Di Teluk Ambon Luar energi gelombang rata-rata dalam bulan Juli – Agustus. Gelombang yang mendominasi perairan teluk baguala adalah tipe gelombang angin.

Kecerahan/kekeruhan

Kecerahan perairan Teluk Ambon bervariasi menurut lokasi dan musim. Kecerahan minimum di TAD dalam musim timur namun tidak bertahan lama karena sirkulasi air lapisan permukaan cukup baik menyebabkan massa Lumpur yang tersuspensi terbawa ke perairan luas. Kecerahan tertinggi di perairan SSL, Lucipara dan TAL pada musim pancaroba dan musim barat yakni > 20 meter. Tingginya nilai kecerahan menyebabkan perairan tampak jernih sehingga potensial bagi berbagai kegiatan wisata bahari dan perikanan budidaya. Tingkat kekeruhan di perairan Kota Ambon mengalami perubahan secara eksponensial sejalan dengan perubahan kedalaman.

Sumber penyebab kekeruhan didominasi oleh butiran partikel renik yang berasal dari aliran sungai dalam musim timur dengan curah hujan tinggi dan erosi tanah dari daerah pertanian, lokasi pemukiman, dan dari hasil suspensi material dasar perairan oleh gelombang pecah. Kisaran nilai kekeruhan layak untuk menunjang berbagai kegiatan perikanan, wisata bahari dan konservasi.

c. Kondisi ekosistem Pesisir dan Laut

Wilayah perairan Kota Ambon memiliki 3 habitat utama perairan tropis yaitu Hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang dengan sebaran yang tidak merata. Kehadiran mangrove lebih menonjol di pesisir TAD (49,5 ha) dan spesies mangrove yang dominan adalah *Sonneratia alba*, *Avicenia marina* serta *Rhizophora stylosa*. Perairan TAL yang relatif lebih luas, ternyata vegetasi mangrovenya hanya terkonsentrasi di pesisir Desa Tawiri dengan luas 10,8 Ha dan spesies mangrove yang dominan adalah *Sonneratia alba*, *Avicenia marina* serta *Rhizophora stylosa*. Sementara di perairan selatan Kota Ambon, habitat utama mangrove hanya ditemukan di pesisir Desa Rutong – Leahari dengan luas hanya 5 Ha dengan spesies yang dominan yaitu *Sonneratia alba*, *Avicenia spp*, *Rhizophora stylosa* dan *Rhizophora macronata*.

Sama seperti hutan mangrove, ternyata padang lamun memiliki sebaran dan luas yang berbeda antara wilayah ekologis perairan pesisir Kota Ambon. Vegetasi lamun lebih menonjol di perairan TAD, terutama di pesisir desa Waiheru dan Poka dengan spesies lamun yang dominan adalah *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemprichii*. Untuk perairan TAL, padang lamun terkonsentrasi dan sangat menonjol di pesisir desa Rutong hingga Leahari, dan spesies yang dominan *Thalassia hemprichii* dan *Syringodium isoetifolium*. Di pesisir selatan Kota Ambon, kehadiran padang lamun yang dominan adalah *Enhalus acoroides*, *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii* dan *Halodule pinifolia*.

Habitat utama terumbu karang tersebar hampir merata di wilayah ekologis perairan Kota Ambon, kecuali di perairan TAD, tipe terumbu karang yang dominan di wilayah perairan Kota Ambon adalah *fringing reef*, sementara di perairan TB dan selatan Kota Ambon terdapat terumbu karang *Apron (Apron reef)* dan merupakan fishing ground ikan demersal potensial. Perairan TAL memiliki 176 spesies karang dari 54 genera dan 18 family.



Gambar 13 : Upaya Rehabilitasi Mangrove di Pantai Desa Lateri Kota Ambon

a. Sumberdaya ikan

Wilayah Kota Ambon memiliki berbagai sumber daya ikan seperti sumber daya ikan pelagis kecil, sumber daya ikan pelagis besar, sumber daya ikan demersal, sumber daya ikan karang, sumber daya bentik. Juga ada perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata bahari.

b. Penyebab Kerusakan Pesisir dan Laut Kota Ambon.

Penyebab kerusakan habitat di pesisir dan laut Kota Ambon adalah disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

- Erosi tanah oleh karena curah hujan yang tinggi / berlebihan, juga pembangunan perumahan di atas gunung oleh masyarakat.
- Pembukaan lahan pertanian yang menyebabkan adanya sedimentasi yang turun melalui sungai.
- Pembukaan pemukiman baru yang menyebabkan adanya sedimentasi.
- Adanya sampah yang dibuang oleh masyarakat baik melalui sungai maupun pada pesisir dan laut.

c. Dampak dari Kerusakan Pesisir dan Laut Kota Ambon

Dampak dari kerusakan pesisir dan laut Kota Ambon adalah sebagai berikut :

- Adanya sedimentasi di sepanjang pesisir dan laut Kota Ambon.
- Terjadi penumpukan sampah di pesisir dan laut Kota Ambon yang menyebabkan banyak biota dan habitat di laut yang mati.

d. Respons terhadap Dampak yang terjadi.

Respons terhadap dampak yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya penataan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kota Ambon.
- Mengajak para investor agar dalam melakukan/melaksanakan kegiatan pembangunan supaya sesuai dengan peraturan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.
- Mengajak masyarakat agar membiasakan hidup bersih dan sehat dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

BAB VIII

REKOMENDASI

1. Peningkatan Pengawasan secara terpadu dan berkelanjutan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan ekosistem darat, pesisir dan laut.
2. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penataan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu demi keberlanjutan pembangunan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan di tingkat Desa / Kelurahan
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat dalam kegiatan Galian C di kawasan pantai dan pegunungan dalam wilayah Kota Ambon.
5. Perlu peningkatan IPTEK bagi Aparatur Pemerintah Kota di Bidang Lingkungan Hidup
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara terpadu pada daerah atau kawasan resapan air dan sumber mata air
7. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah K.3 Penyusunan Peraturan Daerah Kawasan Penyangga.